

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM
MENEKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH**

*Suryati*¹

Universitas Bangka Belitung
Email: mrsryyt@gmail.com

*Ibrahim*²

Universitas Bangka Belitung
Email: iim_babel@yahoo.com

*Ririn Septia*³

Universitas Bangka Belitung
Email: ririn@ubb.ac.id

Abstrak

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kasus angka putus yang cukup tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka partisipasi kasar sekolah yang terus menurun. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi pemerintah melalui *political will* yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut guna menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori *Political will* oleh Brinkerhoff (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi sebagai *political will* yang dilakukan berupa inisiatif pemerintah, program prioritas, mobilisasi dukungan politik, dan penegakan hukum, serta keberlanjutan usaha. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi hambatan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan *political will* dalam menurunkan angka putus sekolah. Salah satu yang menjadi faktor penghambat yang sifatnya mendasar yakni, kondisi dan keadaan geografis Kabupaten Bangka Tengah yang kurang mendukung dalam upaya menekan angka putus sekolah. Rekomendasi yang diajukan meliputi kepemimpinan kepala daerah yang aktif menyuarakan pentingnya pendidikan, kolaborasi formal dengan desa dan dunia usaha melalui kemitraan pendidikan, serta meningkatkan transparansi dan monitoring data anak putus sekolah. Dengan langkah- langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak penurunan angka putus sekolah.

Kata Kunci: Angka Putus Sekolah, *Political will*, Strategi,

Abstract

With a persistent dip in student enrolment rates, Central Bangka Regency is among the regencies in the Bangka Belitung Islands Province with a comparatively high dropout rate. In order to lower the student dropout rate in Central Bangka Regency, this study intends to comprehend the government's approach through the political will by the local administration and to pinpoint the challenges encountered during implementation. Through observation, documentation, and interviews, this study employed a descriptive qualitative research methodology. Brinkerhoff's (2010) Political will Theory was used in this study. The findings demonstrated that government initiatives, priority programs, political support mobilization, law enforcement, and sustainability of efforts are all part of the plan, which is being implemented as a manifestation of political will. The Central Bangka Regency government's political intention to lower the dropout rate is impeded by a number of constraints. The geographic circumstances of the area, which are not ideal for initiatives aimed at lowering the dropout rate, are one major constraint. The suggestions include official cooperation with villages and the business sector through educational partnerships, enhanced openness and monitoring of dropout data, and proactive leadership by regional heads who promote the value of education. It is anticipated that these actions will help lower the dropout rate.

Keywords: *Student Dropout Rates, Political will, Strategy.*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul serta menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek keagamaan, kepribadian, kecerdasan, maupun akhlak (Nababan, 2007). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan, sebab pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial (Didu & Fauzi, 2016).

Namun, realitas pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius, salah satunya adalah tingginya angka putus sekolah. Data dari Kemendikbud (2023) mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir terdapat 76.834 siswa yang putus sekolah, dengan jenjang SD sebanyak 40.623 orang, SMP sebanyak 13.716 orang, dan SMA/SMK sebanyak 22.495 orang. Angka ini menjadi indikasi bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi persoalan mendasar, padahal tingkat pendidikan yang tinggi merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Jamaluddin, 2016).

Fenomena putus sekolah juga terlihat mencolok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara konsisten mencatat angka putus sekolah tinggi selama periode 2020–2022. Rata-rata lama sekolah (RLS) di provinsi ini tercatat sebesar 8,33 tahun, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 8,85 tahun (BPS, 2023). Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu wilayah penyumbang angka putus sekolah terbesar keempat di provinsi tersebut, bahkan menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sejak tahun 2021. Selain itu, angka partisipasi kasar (APK) juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan formal.

Permasalahan ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, dampak pandemi COVID-19, sistem kenaikan kelas, hingga faktor kesehatan dan disrupsi teknologi. Data dari BPS Bangka Tengah (2024) menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Selan menjadi wilayah dengan angka putus sekolah tertinggi di jenjang SD dan SMP. Pemerintah daerah menyadari urgensi permasalahan ini dan mulai mengambil langkah konkret melalui program *Gerakan Penuntasan Identifikasi Putus Sekolah (GETAS ITULAH)*, yang diselaraskan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 sebagai revisi atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam konteks kebijakan publik, *political will* atau kemauan politik menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi strategi pendidikan. Brinkerhoff (2010) menekankan bahwa *political will* mencerminkan kesediaan pemimpin politik untuk bertindak nyata dalam menghadapi permasalahan strategis. Tanpa *political will*, strategi kebijakan cenderung tidak berjalan efektif dan menemui hambatan birokratis serta resistensi sosial-politik (Grindle, 1997; Jenkins, 2001).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menangani angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah, dengan fokus pada *political will* sebagai indikator utama. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif guna menekan angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan karena untuk mengetahui strategi *political will* yang dilakukan pemerintah Bangka Tengah khususnya dinas pendidikan untuk menangani permasalahan angka putus sekolah di Bangka Tengah. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah dengan waktu penelitian sekitar

2 bulan dengan alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena setiap tahunnya angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah terus bertambah cukup banyak terhitung dari 2021 sampai 2023. Subjek utama di dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Bangka Tengah, Ketua dan Komisi II DPRD Bangka Tengah, kemudian pemerintah daerah atau *Stakeholder*, yang dalam hal ini dikhususkan kepada Bappeda Bangka Tengah, *Stakeholder* atau yang mewakili, serta masyarakat, khususnya orang tua dan anak putus sekolah. Data yang digunakan yaitu **Data Primer** berupa data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan **Data Sekunder**, berupa data tidak langsung dari sumber tertulis seperti jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: **Wawancara** yang dilakukan secara langsung untuk menggali informasi dari narasumber tentang strategi *political will* pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah. **Observasi** peneliti mengamati langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran data serta memperkuat hasil wawancara dengan alat bantu seperti kamera, recorder, dan alat tulis. **Dokumentasi** dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi atau tertulis, seperti buku, catatan, berita, notulen, dan arsip lain yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu: **Display Data** yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan foto. Penyajian ini bertujuan mempermudah pemahaman informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi *political will* pemerintah daerah Bangka Tengah. **Reduksi Data** yang diperoleh diseleksi dan disaring untuk dipusatkan pada informasi yang penting dan mendukung fokus penelitian. Reduksi ini membantu peneliti mengelompokkan data ke dalam tema strategis, khususnya terkait upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah. **Penarikan Kesimpulan** berdasarkan analisis data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses ini menjawab rumusan masalah dan menghubungkan temuan dengan teori *political will*, guna merumuskan dampak nyata dari strategi yang dilakukan pemerintah daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Dalam Menekan Angka Putus Sekolah.**

Inisiatif pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menurunkan angka putus sekolah menunjukkan *political will* yang kuat, adaptif, dan berorientasi keadilan sosial.

Pemerintah daerah melalui **Revisi Regulasi Perda Nomor 10 Tahun 2024** untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi pendidikan. Hal ini menjadi dasar legal bagi program-program intervensi nyata. Salah satu wujud inisiatif adalah **Program 10.000 Beasiswa** yang menysasar siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dilengkapi dengan bantuan perlengkapan sekolah, penyaluran kip, dan program bapak asuh. Langkah ini menargetkan langsung penyebab utama putus sekolah, yakni faktor ekonomi. Selain itu, **Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB)** menjadi strategi mengatasi keterbatasan akses dan daya tampung sekolah, khususnya di daerah terpencil. Pemerintah juga menetapkan **Perda Pendidikan Inklusif 2025**, sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan hak pendidikan, terutama bagi anak berkebutuhan khusus.

Inisiatif juga datang dari desa melalui **Pemanfaatan Dana APBDes** untuk beasiswa lokal, serta dari sekolah yang menerapkan mekanisme administrasi untuk mencegah siswa keluar tanpa jaminan diterima di sekolah baru. Secara keseluruhan, inisiatif-inisiatif ini mencerminkan sinergi antara regulasi, program sosial, pembangunan infrastruktur, dan partisipasi lintas level pemerintahan. *Political will* di Bangka Tengah tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan terstruktur untuk memastikan semua anak dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara merata dan inklusif.

Prioritas merupakan unsur utama dalam *political will* suatu instansi pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah, *political will* tersebut tercermin melalui penyusunan *rencana strategis (renstra)* dinas pendidikan yang selaras dengan visi-misi daerah dalam RKPD 2025. Renstra ini tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga bentuk konkret keberlanjutan kebijakan untuk menekan angka putus sekolah. Komitmen politik ini paling nyata terlihat dalam **Alokasi Anggaran**, dinas pendidikan memperoleh 29% dari APBD, lebih tinggi dibanding dinas lain (sekitar 20%). Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi prioritas pembangunan sumber daya manusia. Alokasi besar ini membuktikan bahwa anggaran digunakan sebagai instrumen strategis untuk perubahan, bukan hanya pemenuhan formal atas amanat konstitusi (25%). Namun, *political will* tak hanya diukur dari besarnya anggaran, melainkan juga dari arah dan efektivitasnya. Jika tak ada *political will*, anggaran cenderung habis untuk belanja rutin. Sebaliknya, dengan *political will* yang kuat, dana bisa dialokasikan pada program strategis seperti beasiswa, pendidikan alternatif, hingga pendidikan inklusi.

Empat program prioritas dinas pendidikan menjadi bukti konkret dari *political will* tersebut yaitu **Getas itulah** (gerakan penuntasan identifikasi putus sekolah) menasar identifikasi dan intervensi kelompok rawan putus sekolah sejak 2022. **Kelurahan/desa asuh ipm**, yang berbasis data putus sekolah, mendorong partisipasi pemerintah desa dalam pencegahan putus sekolah lewat pendidikan alternatif. **Kelas dua** (keluarga dan guru asuh), yang fokus pada anak berkebutuhan khusus melalui dukungan psikologis dan inklusi sejak usia dini. Dan **Smp terbuka**, yang memberikan akses pendidikan fleksibel bagi siswa kelas 7–9 yang kesulitan mengikuti smp reguler. Seluruh program ini menunjukkan pendekatan yang progresif, kolaboratif, dan berbasis keadilan akses. Sasaran program diperluas hingga komunitas marjinal, perangkat desa, kelompok tani, hingga umkm dan remaja masjid. Pemerintah daerah membuktikan bahwa komitmen politik bukan sekadar retorika, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, terstruktur, dan berdampak langsung. Dengan demikian, *political will* pemerintah daerah bangka tengah menjadi kunci dalam menurunkan angka putus sekolah. Ia bekerja tidak hanya melalui penganggaran, tetapi melalui keberanian mengambil keputusan, kolaborasi lintas sektor, dan inklusivitas kebijakan. Ini adalah contoh nyata bagaimana *political will* dapat menggerakkan sistem pendidikan ke arah yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

Mobilisasi Dukungan Politik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam menurunkan angka putus sekolah. Di kabupaten bangka tengah, hal ini tercermin dari kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. **Kemitraan Pemerintah dan Baznas** melalui program *zakat fair*, pmda bangka tengah bekerja sama dengan baznas menyalurkan beasiswa dari dana zis kepada lebih dari 1.800 siswa. Program ini menunjukkan *political will* kelembagaan melalui pemanfaatan sumber daya sosial-keagamaan dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. **Peran Camat sebagai Koordinator Local** dimana Camat berperan aktif dalam mendata anak berisiko putus sekolah, mengoordinasikan penyaluran bantuan, dan menyosialisasikan pentingnya pendidikan. Peran ini menunjukkan integrasi kebijakan sosial dengan pendekatan lokal partisipatif. **Kontribusi Satpol PP dalam Penegakan Perda** dengan melaksanakan patroli edukatif dan penegakan aturan wajib belajar. Mereka tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga berkoordinasi lintas instansi untuk mengembalikan anak ke sekolah. Ini mencerminkan perluasan fungsi satpol pp ke arah perlindungan hak anak. **Guru sebagai Agen Perubahan Mikro** yang mana guru melakukan identifikasi,

konseling, advokasi, hingga bantuan langsung kepada siswa berisiko putus sekolah. Ini memperlihatkan *political will individual* berbasis nilai kemanusiaan, bukan hanya kewajiban struktural. Serta **Dukungan Masyarakat** sebagai kekuatan akar rumput yang mana masyarakat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pro-pendidikan, mencegah pernikahan dini, pekerja anak, serta membantu deteksi awal anak putus sekolah. Dukungan ini menunjukkan adanya mobilisasi politik komunitas yang memperkuat efektivitas kebijakan.

Komitmen ini tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan normatif, tetapi juga melalui **Penegakan Hukum** yang responsif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Melalui **Perda No 7 Tahun 2021** Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perubahan atas Perda No 1 Tahun 2014 ini memperkuat kewajiban orang tua dalam memastikan anak mengikuti pendidikan dasar. Penegasan ini menjadi bentuk komitmen politik formal pemerintah dalam menjamin pendidikan sebagai hak anak. Perda ini juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya perlindungan anak, namun tantangan seperti kemiskinan dan keterbatasan akses masih menghambat efektivitas implementasi. *Political will*nya terlihat dari keseriusan daerah menyesuaikan regulasi agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan menurunkan angka putus sekolah.

Perda No. 4 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak (Kla), dimana Perda ini memperluas cakupan perlindungan anak, termasuk di bidang pendidikan. Pemerintah wajib menyediakan sarana pendidikan yang layak, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Perda ini mengarusutamakan pendekatan “*child rights-based governance*” dalam sistem pemerintahan daerah, menandai *political will* yang holistik, tidak hanya legal-formal. Peran forum anak daerah (fad) dan patbm, dimana Fad dan patbm mendorong anak-anak, termasuk yang berkebutuhan khusus dan korban kekerasan, agar tetap bersekolah. Mereka juga mengadvokasi kasus putus sekolah, diskriminasi, dan kekerasan di tingkat komunitas. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan non-represif dan partisipatif berbasis komunitas, memperluas efektivitas perda melalui kontrol sosial lokal. Implementasi penegakan hukum pemerintah kabupaten bangka tengah telah menjalankan sistem pelaporan digital anak putus sekolah, monitoring oleh satuan tugas berbasis surat keterangan resmi, dan kewajiban desa/kecamatan menindaklanjuti temuan anak tidak sekolah. Hal ini mencerminkan bentuk penegakan hukum administratif dan sosial yang mendukung regulasi formal secara konkret.

Political will tidak cukup diukur dari komitmen sesaat, tapi dari **Keberlanjutan Usaha (Sustainability)** yang sistemik, melampaui kepemimpinan dan bersifat jangka panjang. Di Bangka Tengah, komitmen ini tercermin dalam program yang konsisten sejak 2022 dan penguatan kelembagaan pendidikan di tingkat lokal. Evaluasi triwulanan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan menjadi wujud monitoring aktif untuk merespons tantangan lapangan secara cepat dan adaptif. Langkah konkret yang dilakukan meliputi optimalisasi asset melalui konversi bus kepegawaian menjadi bus sekolah, pemerataan guru melalui distribusi dan peningkatan kompetensi untuk keadilan pendidikan, penguatan kelembagaan melalui pembinaan manajemen sekolah di semua jenjang, akuntabilitas dana BOS melalui pelatihan pengelolaan dan penggunaan tepat sasaran, dan Pendidikan alternatif melalui penyiapan jalur nonformal dan kesetaraan bagi anak rentan.

Ciri *political will* Bangka Tengah yang sudah dilakukan sistemik, mendorong pemerataan akses dan kualitas, mengedepankan efisiensi dan transparansi, menjangkau anak melalui pendidikan inklusif, dan memperkuat tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, *political will* yang efektif bukan hanya menghasilkan output jangka pendek, tetapi juga perubahan struktural jangka panjang dalam sistem pendidikan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan putus sekolah dan kesenjangan pendidikan.

Pemerintah Daerah Bangka Tengah menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam upaya menurunkan jumlah anak yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Tantangan-tantangan tersebut mencakup beberapa faktor yaitu: tantangan pada tingkat kebijakan dan sumber daya meliputi, **Keterbatasan anggaran**, anggaran daerah yang terbatas menyebabkan program penanganan putus sekolah tidak optimal, dengan dana lebih banyak terserap untuk gaji guru dan infrastruktur, sementara program preventif dan evaluasi kurang diperhatikan. Ketergantungan pada dana eksternal (csr, lsm, baznas) membuat program tidak berkelanjutan. **Keterbatasan akses geografis**, wilayah terpencil dengan jarak jauh ke sekolah dan minim transportasi menghambat akses anak ke pendidikan, sehingga risiko putus sekolah tinggi, terutama dari sd ke smp. Kondisi ini diperparah oleh buruknya infrastruktur dan sarana transportasi yang terbatas. **Kualitas dan pemerataan tenaga pendidikan**, distribusi guru yang tidak merata dan keterbatasan jurusan sekolah menyebabkan siswa di daerah terpencil kehilangan motivasi karena tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. **Data tidak real-time dan minimnya sistem pengawasan**, sistem pelaporan dan pemantauan siswa yang manual dan tidak terintegrasi menyebabkan keterlambatan intervensi dini terhadap anak

yang berisiko putus sekolah, sehingga penanganan tidak tepat waktu. *Political will* yang dibutuhkan yaitu realokasi anggaran yang prioritas untuk pendidikan, inovasi layanan seperti smp terbuka dan transportasi pendidikan, insentif untuk guru daerah 3t, digitalisasi sistem data, dan penguatan pengawasan berbasis komunitas.

Kemudian tantangan pada tingkat stakeholder dan orang tua meliputi faktor ekonomi, kemiskinan memaksa anak berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Biaya pendidikan (seragam, transportasi, kebutuhan lain) masih menjadi beban berat bagi kelurgamiskin. **Kurangnya sosialisasi tentang informasi pendidikan** terkait bantuan beasiswa dan program pemerintah kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga keluarga miskin tidak memanfaatkan bantuan yang tersedia dan anak tetap putus sekolah. **Sikap orang tua dan anak** karena kurangnya motivasi belajar, rasa bosan, dan pilihan kerja dini yang menjanjikan penghasilan langsung menyebabkan anak meninggalkan sekolah. Dukungan orang tua yang cenderung mengizinkan anak bekerja juga memperkuat fenomena ini.

Political will yang dibutuhkan yaitu dengan bantuan langsung berupa beasiswa dan subsidi alat sekolah, kampanye dan sosialisasi pendidikan yang intensif melalui tokoh masyarakat dan media lokal, pendampingan keluarga melalui kader dan forum orang tua, serta penyediaan jalur pendidikan nonformal dan ruang partisipasi anak dalam kebijakan pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemerintah daerah Bangka Tengah dalam menekan angka putus sekolah dengan menggunakan teori *political will* dari Brinkerhoff, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah sudah menunjukkan arah positif dan menghasilkan capaian penting. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis seperti pembaharuan regulasi (revisi Perda No. 5 Tahun 2014 menjadi No. 10 Tahun 2024), program beasiswa, pembangunan infrastruktur pendidikan, penerbitan Perda pendidikan inklusif, serta inisiatif desa dan sekolah. Prioritas anggaran lebih difokuskan pada pendidikan melalui program seperti getas itulah, keluarga asuh, guru asuh, SMP terbuka, dan kelurahan/desa asuh.

Mobilisasi dukungan politik juga telah dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi pemerintah, serta penegakan hukum yang memastikan akses dan

fasilitas pendidikan yang layak bagi anak. Upaya keberlanjutan dilakukan melalui evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk mengatasi hambatan yang muncul.

Namun, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan implementatif, seperti keterbatasan anggaran, akses geografis yang sulit, pemerataan tenaga pendidik, sistem data yang belum optimal, serta faktor ekonomi dan sosial dari keluarga. Oleh karena itu, komitmen dan kolaborasi berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memastikan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak di Bangka Tengah.

Saran

1. Pemerintah Daerah Bangka Tengah

- Perkuat implementasi dan pengawasan Perda pendidikan inklusif dan perlindungan anak.
- Maksimalkan alokasi anggaran pendidikan untuk program strategis seperti beasiswa dan pendidikan alternatif.
- Tingkatkan kualitas data pendidikan real-time dan sistem pelaporan.
- Dorong pemerataan guru dengan insentif bagi yang bertugas di wilayah terpencil.
- Jadikan evaluasi triwulan sebagai dasar perbaikan kebijakan nyata dan berkelanjutan.

2. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

- Libatkan aktif masyarakat dalam sosialisasi pentingnya pendidikan, terutama di daerah dengan angka putus sekolah tinggi.
- Berdayakan Forum Anak, PATBM, dan organisasi masyarakat sebagai penghubung pemerintah dengan anak-anak rentan.
- Dukung kerja sama lintas sektor, termasuk BAZNAS dan dunia usaha, untuk pembiayaan dan pelaksanaan program.

3. Peneliti Selanjutnya

- Eksplorasi efektivitas program spesifik (GETAS ITULAH, SMP Terbuka, Keluarga/Guru Asuh) secara kuantitatif.
- Fokus pada peran *political will* di tingkat desa/kelurahan dalam akses pendidikan.
- Lakukan kajian longitudinal untuk melihat hubungan *political will* dengan perubahan sistemik pendidikan.

TENTANG PENULIS

Penulis bernama Suryati mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung Angkatan 2021. Penulis merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara yang lahir pada tanggal 02 September 2002 beralamat di Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis merupakan alumni SMAN 1 Koba.

DAFTAR PUSTAKA

a. Dari Buku, skripsi, dan jurnal ilmiah:

- Adlin, Muchtar, E., & Hadi, S. (2021). *Political will* Walikota dalam Memutus Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Pekanbaru. *Jurnal Moderat*, 7(4), 693–712.
- Ardi isnanto, B. (2023). KEMAMPUAN HIGHER ORDER THINKING SKILL (HOTS) DALAM PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI SD 19 PALEMBANG Florens. *Detikproperti*, 09, 119–121.
- bangkatengahkab.bps.go.id/. (n.d.). *jumlah anak putus sekolah di bangka tengah*. Bangkatengahkab.Bps.Go.Id/. <https://bangkatengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjU2IzI=/siswa-putus-sekolah-smp-mts-.html>
- Brinkerhoff, D. W. (2010). Unpacking The Concept of *Political will* to Confront Corruption. *U4 Brief*, 1, 1–4.
- data.kemdikbud.go.id. (2023). *No Title Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Tiap Provinsi*. Data.Kemdikbud.Go.Id. <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/p/peserta-didik/jumlah-siswa-putus-sekolah-menurut-tingkat-tiap-provinsi-indonesia-sd-2023>
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- <https://ombudsman.go.id/>. (2024). *Tren Putus Sekolah di Bangka Tengah Meningkat*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--tren-putus-sekolah-di-bangka-tengah-meningkat-ombudsman-sudah-beri-tiga-saran-kajian>
- Jamaluddin, A. A. (2016). Permasalahan Pendidikan dan Solusinya. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Lazuardi Righa Akbar. (2024). *Implementasi peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 7 tahun 2015 tentang penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan meninjau pada upaya penganggulangan anak jalanan di kota Pangkalpinang*.
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Nababan, B. B. R. (2007). Penggunaan Media Flashcard dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Pada Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris Kelas II MI Ar-Rohman Samarang Garut. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 4(1), 10–18.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Penelitian, J., & Indonesia, P. (2024). *PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH (Studi di SMPN2 Kamang Magek)*. 1(4), 334–342.
- permasalahan tren angka putus sekolah meningkat di Bangka Tengah. (2024). *permasalahan tren angka putus sekolah meningkat di Bangka Tengah*. https://bangka.tribunnews.com/2024/02/20/dewan-pendidikan-ulas-penyebab-angka-putus-sekolah-meningkat-di-bangka-tengah-singgung-imbas-gadget#google_vignette
- Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). Defining *political will*. *Politics and Policy*,

- 38(4), 653–676. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x>
- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>
- Silmi, S. (2017). *Metoda Penelitian. Bab III Metoda Penelitian, Bab iii me*, 1–9.

b. Dari Artikel dan Berita Online:

- Bangkatengahkab.bps.go.id/. (n.d.). *jumlah anak putus sekolah di bangka tengah*. Bangkatengahkab.Bps.Go.Id/. <https://bangkatengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjU2IzI=/siswa-putus-sekolah-smp-mts-.html>
- Data.kemdikbud.go.id. (2023). *No TitleJumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Tiap Provinsi*. Data.Kemdikbud.Go.Id. <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/p/peserta-didik/jumlah-siswa-putus-sekolah-menurut-tingkat-tiap-provinsi-indonesia-sd-2023>
- <https://ombudsman.go.id/>. (2024). *Tren Putus Sekolah di Bangka Tengah Meningkat*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--tren-putus-sekolah-di-bangka-tengah-meningkat-ombudsman-sudah-beri-tiga-saran-kajian>
- Permasalahan tren angka putus sekolah meningkat di Bangka Tengah. (2024). *permasalahan tren angka putus sekolah meningkat di Bangka Tengah*. https://bangka.tribunnews.com/2024/02/20/dewan-pendidikan-ulas-penyebab-angka-putus-sekolah-meningkat-di-bangka-tengah-singgung-imbasi-gadget#google_vignette

c. Dari Dokumen:

- Dokumen Renstra, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. (2024).
- Dokumen RPJMD, Kabupaten Bangka Tengah. (2021-2026).
- Dokumen RKPD, Kabupaten Bangka Tengah. (2025).